

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota Padang memiliki posisi yang sangat strategis dalam sejarah kolonial Belanda di kawasan Pantai Barat Sumatera. Sejak abad ke-17, Padang telah berkembang sebagai pusat aktivitas dagang dan pelabuhan penting bagi Verenigde Oostindische Compagnie (VOC), sebelum kemudian berlanjut pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Letaknya yang menghadap langsung ke Samudra Hindia menjadikan Padang sebagai pintu masuk utama jalur perdagangan internasional, sekaligus sebagai penghubung antara wilayah pesisir dan daerah pedalaman Sumatera yang kaya akan sumber daya alam. Kondisi geografis ini mendorong tumbuhnya Padang sebagai simpul ekonomi kolonial yang vital dalam jaringan perdagangan regional maupun global.

Dalam berbagai kajian sejarah, Padang umumnya dipahami sebagai kota dagang dan pelabuhan kolonial. Narasi ini menempatkan aktivitas perdagangan, pelayaran, dan distribusi komoditas sebagai faktor utama pembentuk perkembangan kota. Padang sering digambarkan sebagai pusat transaksi ekonomi yang melayani kepentingan kolonial di Sumatera Barat, baik dalam konteks perdagangan hasil bumi maupun sebagai pelabuhan transit. Pemahaman tersebut, meskipun tidak keliru, cenderung menempatkan Padang secara sempit hanya dalam kerangka ekonomi kolonial.

Pemaknaan yang dominan sebagai kota dagang tersebut berpotensi menyederhanakan kompleksitas fungsi Kota Padang pada masa kolonial. Di balik

perannya sebagai pusat perdagangan, Padang juga berkembang sebagai pusat kekuasaan kolonial yang memiliki kepentingan strategis dalam bidang pertahanan dan keamanan. Seiring meningkatnya perlawanan lokal di wilayah Minangkabau, ekspansi kekuasaan kolonial ke daerah pedalaman, serta dinamika konflik regional seperti Perang Paderi dan Perang Aceh, pemerintah kolonial Belanda semakin menyadari pentingnya Padang sebagai basis militer utama di Pantai Barat Sumatera. Dalam konteks ini, Padang tidak hanya berfungsi sebagai kota ekonomi, tetapi juga sebagai titik kendali militer dan administratif kolonial.

Menurut Jorge Hardoy salah satu kriteria kota yaitu memiliki multifungsi dengan adanya pasar, pusat administrasi dan politik, pusat pendidikan dan pusat militer¹. Kota di Indonesia mengalami penataan saat masuknya Pemerintah Kolonial Belanda. Seiring dengan itu, Pemerintah Hindia Belanda melihat perlu adanya suatu kesatuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayahnya. Salah satu kota yang mengalami perkembangan masa Kolonial Belanda adalah Kota Padang². Padang pada masa setelah Perang Paderi mulai dikembangkan menjadi pusat perdagangan dan pusat militer dalam tata pemerintahan Pemerintah Kolonial Belanda.

Perubahan fungsi tersebut tercermin secara nyata melalui pembangunan dan keberadaan berbagai infrastruktur militer di Kota Padang. Benteng, barak dan tangsi militer, gudang senjata, penjara, rumah pejabat militer, serta pos-pos

¹ Lihat Rifki Firdaus, "Perkembangan Kota Padang 1870-1945", Skripsi (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), hml 2.

² Dila Sari dkk, "Pergundikan dalam Tangsi Militer Belanda Tahun 1830", dalam Jurnal Keguruan Universtas Lampung, hlm 4

penjagaan dibangun dan ditempatkan secara strategis dalam struktur kota. Infrastruktur tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana pertahanan fisik, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian wilayah dan masyarakat. Penjara kolonial yang dikenal dengan istilah *tangsi*, misalnya, tidak semata-mata menjadi tempat penahanan, tetapi juga berperan sebagai alat represif yang mendukung sistem kekuasaan militer kolonial dalam menjaga stabilitas dan ketertiban.

Dalam konteks sejarah perkotaan kolonial, keberadaan infrastruktur militer tersebut menunjukkan bahwa pembentukan dan perkembangan Kota Padang tidak semata-mata ditentukan oleh faktor ekonomi dan perdagangan. Kepentingan militer kolonial turut memainkan peran penting dalam membentuk struktur ruang, pola pembangunan, dan fungsi kota. Kota dalam sistem kolonial sering kali dirancang sebagai ruang kekuasaan, tempat berbagai fungsi seperti administrasi, ekonomi, dan militer, berkelindan dalam satu struktur yang saling mendukung. Oleh karena itu, kota kolonial tidak dapat dipahami hanya sebagai entitas fisik atau pusat aktivitas ekonomi, melainkan sebagai produk relasi kekuasaan yang berkembang secara historis.

Meskipun Padang sering disebut sebagai kota dagang dan pelabuhan kolonial, kajian yang menempatkannya secara sistematis sebagai kota militer dalam kerangka sejarah kota kolonial masih sangat terbatas. Penelitian-penelitian terdahulu umumnya menyoroti Padang dari aspek perdagangan, pelabuhan, atau administrasi kolonial, sementara peran institusi militer dalam membentuk struktur ruang, fungsi kota, dan kebijakan kolonial belum dikaji secara mendalam dan terpadu. Akibatnya, dimensi militer dalam sejarah Kota Padang kerap dipahami

secara parsial dan terpisah dari dinamika perkotaan secara keseluruhan.

Padahal, pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, Padang tidak hanya berfungsi sebagai pusat perdagangan dan administrasi kolonial, tetapi juga sebagai pusat logistik militer dan basis pengendalian wilayah Sumatera Westkust. Penetapan Padang sebagai ibu kota Sumatera Westkust semakin memperkuat peran strategis kota ini dalam sistem pemerintahan kolonial Belanda. Dalam posisi tersebut, unsur militer memiliki peran yang signifikan dalam pengambilan kebijakan, pengelolaan kota, serta pengawasan terhadap wilayah dan penduduk.

Padang telah menjadi markas operasi pemerintah Belanda sejak sebelum abad ke-19 dan telah berkembang menjadi kota (urban) yang relatif kosmopolitan³. Hal ini dapat dilihat pada masa saat VOC mendirikan Loji atau Loge di Gunung Padang atau yang dikenal juga dengan *Apen Berg* pada perempat terakhir abad ke-17. Berdirinya Loji yang dinilai cukup ideal menggambarkan posisi Padang yang cukup penting dalam kegiatan VOC di kawasan pantai barat Sumatera⁴.

Pada masa Perang Paderi, Padang tidak diprioritaskan sebagai pusat militer Belanda. Hal ini dikarenakan Perang Paderi berpusat di kawasan Darek atau dataran tinggi Sumatera Barat. Setelah perang Paderi berakhir, Pemerintah Kolonial Belanda mulai memperhatikan dan menjadikan Padang sebagai pangkalan militer. Oleh karena itu, Pemerintah Kolonial membangun pergudangan, depot, dan basis

³ Elizabeth E. Graves, *Asal-Usul Elite Minangkabau Modern Respons Terhadap Kolonial Belanda Abad XIX* (Jakarta: Yayasan Ombak, 2007), hlm.152.

⁴ Gusti Asnan, *Pemerintah Sumatera Barat Dari VOC Hingga Reformasi*, (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2006), hlm.2.

pertahanan⁵. Hal ini juga ditujukan untuk memperkuat NHM (Nederlandsche Handel Maatschappij) di Kota Padang. NHM Padang merupakan satu-satunya yang berada di luar Jawa. Kantor NHM terdapat di pinggir Batang Arau sehingga menjadikan Batang Arau sebagai pusat perdagangan Kota Padang⁶.

Pada tahun 1837 diangkatlah Kolonel Mischiels sebagai Gubernur Militer di Sumatera Barat sebagai pemimpin sipil dan militer. Perangkap jabatan ini bertujuan untuk mengontrol kondisi dan situasi di Padang dan Sumatera Barat umumnya, baik dari segi politik, militer, sosial maupun ekonomi.

Pada tahun 1840 kekuasaan militer Belanda di Padang dibagi menjadi empat wilayah. Pertama, dinamai *central operatie basis*, (penempatan di daerah yang mempunyai ancaman paling tinggi). Kedua, wilayah untuk menghadapi ancaman dari luar yakni (daerah kawasan masih merdeka sekitaran kawasan timur Sumatera)⁷. Ketiga, diprioritaskan menjaga kawasan pantai barat Sumatera termasuk Padang di dalamnya. Keempat, berupa post-post penjagaan berlokasi di perbatasan Sumatera Barat dengan Sumatera Timur. Di Kota Padang ditempatkan cukup banyak tentara, yakni 6 perwira dan 150 prajurit⁸.

Dirk Woortman, opsir Belanda yang bertugas di Padang, menulis surat yang bertanggal 20 Juli 1845. Ia menyampaikan bahwa Kota Padang kala itu sedang sibuk

⁵ Eko Alvares Zaiddulfar, "Morfologi Kota Padang", Disertasi, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2002), hl m46.

⁶ Freek Colombijn, *Paco-Paco (Kota) Padang* (Yogyakarta: Ombak, 2006), hl m 83.

⁷ Gusti asnan, *Op.cit* hlm 59.

⁸Gusti Asnan, *Loc. Cit.*

membangun penjara baru⁹. Pembangunan penjara baru ini ditujukan sebagai bagian dari unsur pertahanan dan kekuasaan. Padang bukan saja menampung tahanan Pribumi bekas Perang Paderi, tetapi juga tahanan dari Pesisir bagian Selatan dan Utara Pantai Barat Sumatera dikirim ke Padang¹⁰.

Keberadaan Padang sebagai kota militer semakin kuat saat terjadinya Perang Aceh tahun 1873–1904. Padang berfungsi sebagai tempat peristirahatan atau merawat tentara yang cedera¹¹. Padang, selain sebagai kota perdagangan, juga merupakan pangkalan militer masa itu. Sebagai Kota Pertahanan, Padang memiliki batas-batas alam seperti sungai dan laut di sebelah selatan dan barat. Pada bagian utara terdapat beberapa fasilitas pertahanan, seperti benteng dan fasilitas militer lainnya¹². Oleh karena itu, Kota Padang dilengkapi dengan bangunan-bangunan militer seperti barak, tangsi, gedung-gedung penyimpanan alat-alat perang. Bangunan-bangunan tersebut berupa gedung besar yang tinggi dan tebal.

Kota Padang sebagai kota militer dapat dilihat pada peta tahun 1889, 1915 hingga 1945. Kota Padang menggambarkan persebaran bangunan militer yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Zona militer banyak terletak di distrik Ganting, sebelah utara Masjid Ganting¹³. Di distrik ini terdapat barak militer Belanda, tempat tinggal pejabat militer, dan juga rumah sakit. Rumah sakit tentara

⁹ Dedi Arsa, “Tangsi-Tangsi Kolonial dan Tahanan Perempuan di Sumatera Barat”, dalam *Journal of Gender Studies Kafaah*, hlm4.

¹⁰ Ibid, hlm3.

¹¹ Rusli Amran, *Padang Riwayatmu Dulu*. (Jakarta: Yasaguna 1988) , hlm11.

¹² Ibid, hlm 11.

¹³ Rusli Amran, *Op. Cit*, hlm 25.

ini bahkan mirip dengan benteng jika dilihat dari luar¹⁴. Peta-peta itu menunjukkan bahwa Kota Padang memiliki persebaran bangunan militer . Tahun 1889 berjumlah 12 bangunan seperti *Magazijn van oorlog* (Gudang Senjata), *Afdeelingmagazijn* (Gudang Pakaian Tentara), *Kogelvanger* (Gudang Peluru) serta *Gouvenaker Atelier* (tempat pembuatan senjata).

Perkembangan Kota Padang sejak sekitar 1906 membuat wilayah tidak lagi berfokus di kawasan Batang Arau, tetapi bergerak ke arah utara di sekitar *Plan van Rome* dan *Plan van Michiels*¹⁵. Hal yang perlu digarisbawahi, ternyata kawasan militer era kolonial juga tidak berubah setelah kemerdekaan. Hal ini tentu saja saling berkaitan. Daerah militer Kota Padang yakni Rumah Sakit TNI, Detasemen Polisi Militer yang letaknya di kawasan barat. Jika dilihat, masa sekarang Jalan Benteng juga tetap sama, namun hanya namanya saja diganti menjadi Jalan Bagindo Aziz Chan.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan sebuah kajian yang menempatkan Kota Padang dalam perspektif sejarah kota kolonial dengan menekankan peran dan fungsi militer sebagai salah satu faktor utama pembentuk perkembangan kota. Pendekatan ini penting untuk mengungkap bagaimana kepentingan pertahanan dan keamanan kolonial memengaruhi struktur ruang kota, pembangunan infrastruktur, serta kebijakan administrasi kolonial di Padang. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai posisi Kota Padang sebagai kota militer, sekaligus memperkaya historiografi kota-

¹⁴ Rusli Amran, *Loc. Cit*

¹⁵ Eko Alvares, *Op. Cit*, hlm 55

kota kolonial di Indonesia.

Penelitian ini menjadi kajian yang menarik untuk diteliti karena menjelaskan bahwa Padang tidak hanya sebagai kota perdagangan, tetapi juga memiliki sarana dan prasarana militer untuk tujuan strategis atau pertahanan. Pemerintah kolonial banyak mengubah Padang yang awal hanya sebuah pelabuhan kecil menjadi pusat militer Belanda di Sumatera Barat pada akhir abad ke-19. Penelitian ini menarik untuk dikaji karena pada umumnya penelitian sejarah militer hanya berkaitan dengan benteng, padahal dapat juga membahas hal-hal yang berhubungan dengan pertahanan sebuah kota dan wilayah.

Meskipun Padang sering disebut sebagai kota dagang dan pelabuhan kolonial, kajian yang menempatkannya secara sistematis sebagai *kota militer* dalam kerangka sejarah perkotaan kolonial masih sangat terbatas. Hal penting lainnya adalah bahwa topik tentang kota militer ini relatif belum banyak diteliti oleh para sejarawan. Biasanya penulisan selalu berkaitan dengan benteng. Padahal Kuntowijoyo mengungkapkan jika pembahasan tentang sejarah militer keluar dari pembahasan benteng maka akan menjadi daya tarik bagi pembaca umum¹⁶.

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian mengenai sejarah Kota Padang sebagai kota militer dalam skripsi ini diberi judul “Padang sebagai Kota Militer abad ke-19 hingga Awal Abad ke-20”

¹⁶ Kuntowijoyo. *Metodologi Sejarah*. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), hlm 13.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa Pemerintah Kolonial Belanda menjadikan Padang sebagai kota militer sejak akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20?
2. Bagaimana gambaran Kota Padang sebagai kota militer di Sumatera Barat?
3. Bagaimana pengaruh keberadaan Padang sebagai ibu kota militer dan ibu kota Sumatera Weskust pada rentang waktu abad ke-19 hingga awal abad ke-20?

Batasan spasial dalam penelitian ini adalah Kota Padang pada masa kolonial Belanda. Pemilihan Kota Padang sebagai batasan spasial didasarkan pada perannya yang strategis dalam sistem kolonial di Pantai Barat Sumatera. Pada awal perkembangannya, Padang merupakan sebuah pelabuhan kecil dengan struktur kota yang belum tertata secara teratur. Perubahan signifikan dalam tata kota dan fungsi Padang mulai terjadi seiring diterapkannya kebijakan administrasi dan militer kolonial, khususnya pada masa pemerintahan De Stuers. Pada periode ini, Kota Padang ditetapkan sebagai ibu kota *Residentie van Padang* yang dipimpin oleh seorang *Gouverneur Civil en Militair* (Gubernur Sipil dan Militer), sehingga memperkuat posisi Padang sebagai pusat kekuasaan kolonial yang mengintegrasikan fungsi administratif dan militer.

Batasan temporal penelitian ini mencakup akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Akhir abad ke-19 dijadikan sebagai batasan awal karena pada periode tersebut Kota Padang mulai berfungsi secara intensif sebagai basis militer kolonial

Belanda. Padang dijadikan sebagai tempat pemberhentian dan konsentrasi pasukan kolonial yang akan diberangkatkan ke Aceh, sekaligus difungsikan sebagai pusat logistik dan pengobatan bagi tentara yang mengalami sakit atau cedera selama berlangsungnya Perang Aceh. Kondisi tersebut mendorong pemerintah kolonial Belanda untuk menata Kota Padang sebagai pusat pertahanan dan pendukung operasi militer di wilayah barat Sumatera.

Sementara itu, batasan akhir penelitian ditetapkan pada awal abad ke-20, yaitu pada masa berakhirnya kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia. Penetapan batasan waktu ini dimaksudkan agar penelitian dapat memfokuskan analisis pada periode ketika fungsi militer kolonial masih berperan dominan dalam pembentukan struktur ruang, kebijakan administrasi, dan perkembangan Kota Padang sebagai kota kolonial.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini di antaranya:

- a. Mengetahui alasan Pemerintah Kolonial Belanda menjadikan Padang sebagai kota militer pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20.
- b. Menjelaskan gambaran Kota Padang sebagai kota militer penggambarannya SumateraBarat.
- c. Mengetahui pengaruh keberadaan Kota Padang sebagai ibukota militer dan ibukota Sumatera Weskust

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian historiografi kota kolonial di Indonesia, khususnya dalam perspektif sejarah kota dan sejarah militer. Dengan menempatkan Kota Padang sebagai kota militer, penelitian ini memberikan sudut pandang alternatif terhadap pemahaman yang selama ini lebih menekankan aspek perdagangan dan pelabuhan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai peran institusi militer kolonial dalam pembentukan struktur ruang, fungsi kota, dan kebijakan administrasi kota-kota kolonial di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dan referensi bagi mahasiswa, peneliti, dan pemerhati sejarah yang tertarik pada kajian sejarah kota, sejarah kolonial, dan sejarah militer, khususnya yang berkaitan dengan Kota Padang dan kawasan Sumatera Barat. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian sejarah lokal di lingkungan Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Andalas, serta menjadi dasar bagi penelitian lanjutan yang mengangkat tema serupa.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang sejarah Kota Padang di masa kolonial. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi generasi selanjutnya dalam meneliti tema pembahasan yang berkaitan dengan sejarah kota, khususnya mahasiswa Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Unand.

E. Tinjauan Pustaka

Ada beberapa sumber yang dijadikan bahan acuan dalam penulisan proposal ini, yang di antaranya berupa buku dan jurnal, serta artikel-artikel yang ditulis di media massa yang memberikan pemaparan lebih jelas. Berikut beberapa sumbernya:

Buku dengan judul “Pengantar Sejarah Kota” yang ditulis oleh Purnawan Basundoro membahas secara ringkas mengenai seluk eluk sejarah kota di Indonesia sejak masa kuno hingga masa kontemporer¹⁷. Buku ini menjelaskan pembabakan sejarah kota, yakni era kota tradisional (prakolonial), era kolonial, dan era pascakolonial. Menurut buku ini, era kolonial adalah era kota-kota yang berada di bawah kendali pemerintah atau pemerintah jajahan. Dijelaskan juga dalam buku ini bahwa kota militer dibentuk karena wilayah kekuasaan yang luas sehingga membutuhkan aparat militer yang memiliki fungsi mencegah terjadinya pemberontakan.

Buku yang ditulis oleh Rusli Amran “Padang Riwayatmu Dulu” banyak sekali membahas Kota Padang yang jarang diketahui oleh masyarakat sekarang, buku ini membahas secara detail dari sudut-sudut kecil Kota Padang pada masa awal datangnya bangsa asing¹⁸. Secara jelas, buku ini menuliskan bahwa alasan Kota Padang disebut kota tentara berawal dari banyaknya gedung-gedung, tentara, tangsi, dan perbentengan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa pemicu mengapa hal tersebut terjadi, salah satunya adalah Padang menjadi tempat peristirahatan atau rawat tentara yang sakit. Padang yang saat itu menjadi target

¹⁷ Purnawan Basundoro, *Pengantar Sejarah Kota*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012)

¹⁸ Rusli Amran, *Padang Riwayatmu Dulu*. (Jakarta: Yasaguna, 1988)

VOC untuk berdagang berakibat rawan serangan musuh. Untuk mencoba mempertahankan kekuasaannya, pihak Pemerintah Belanda mencoba memperkuat pertahanannya.

Ada pula buku yang berjudul “Dunia Maritim Pantai Barat Sumatera” yang ditulis oleh Gusti Asnan¹⁹. Buku ini menjelaskan mengenai aktivitas perdagangan dan pelayaran di daerah administrasi pantai barat Sumatera. Tidak sampai di situ, dalam buku ini juga dipaparkan alasan mengapa Sumatera Barat menjadi salah satu daerah incaran VOC untuk berdagang. Pengaruh VOC yang besar di daerah kawasan ini juga melatarbelakangi Kota Padang tahun 1666 dijadikan pusat dari *hoofdcomptoir*. Dalam buku ini ditemukan juga sebuah fakta bahwa ada aktivitas bajak laut pada masa itu yang menyebabkan Pemerintah Hindia Belanda mendirikan pos pengaman di kota pantai, salah satunya di Kota Padang.

Selain itu terdapat buku yang ditulis juga oleh Gusti Asnan yakni “Pemerintahan Sumatera Barat Dari VOC Hingga Reformasi”²⁰. Bab awal buku membahas awal mula kedatangan VOC di Sumatera Barat, mulai dari peran Aceh yang dominan kala itu yang menguasai perdagangan pantai barat Sumatera hingga dilepaskannya Kota Padang dari pengaruh Aceh itu sendiri. Buku ini juga menuliskan logia atau loge terbesar di kawasan Sumatera Barat yang berlokasi di muara Batang Arau, tepatnya di Gunung Padang bagian utara. Lalu dijelaskan juga bahwa keadaan Sumatera Barat yang kurang stabil setelah Perang Paderi membuat

¹⁹ Gus Asnan, *Dunia Maritim Pantai Barat Sumatera*, (Yogyakarta: Ombak, 2007).

²⁰ Gusti Asnan, *Pemerintahan Sumatera Barat Dari VOC Hingga Reformasi*, (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2006)

sekitar awal tahun 1840 dibagi ke dalam empat penempatan. Salah satunya, Kota Padang adalah penempatan ketiga yang dikhususkan di kawasan pantai barat Sumatera Barat.

Selanjutnya ada buku yang ditulis oleh Elezabet E.Grave dengan judul “Asal-Usul Elite Minangkabau Modern (Respons terhadap kolonial Belanda abad XIX/XX)”²¹. Buku ini menjelaskan reaksi bumiputra terhadap kekuasaan Belanda di Minangkabau. Dalam buku banyak dijelaskan awal mula datangnya VOC ke Sumatera Barat hingga pengaruhnya di berbagai bidang kehidupan masa itu. Di Kota Padang sendiri banyak konflik-konflik serta pemberontakan dari masyarakat akibat Perang Paderi, di antaranya pemberontakan di Pauh tahun 1844. Belanda yang dinilai memenangkan peperangan serta hati masyarakat kemudian membentuk pemerintahan administratif.

Dalam buku yang disusun oleh Mardanas Safwan, dkk dengan judul “Sejarah Kota Padang”²². Buku ini menjelaskan bahwa Kota Padang memanglah kota militer. Buku ini memaparkan bahwa Padang banyak membangun tangsi-tangi yang berfungsi sebagai tempat pemberangkatan tentara Belanda dan juga tempat istirahat saat terjadinya Perang Aceh.

Buku lainnya ditulis oleh Freek Colombijn dengan judul “Paco-Paco Kota Padang”²³. Buku ini membahas mengenai Kota Padang abad ke-20, tepatnya tahun

²¹ Elizabeth E. Graves, *Asal-Usul Elite Minangkabau Modern Respons Terhadap Kolonial Belanda Abad XIX* (Jakarta: Yayasan Ombak, 2007)

²² Safwan, Mardanas, dkk. *Sejarah Kota Padang* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1987)

²³ Freek Colombijn, *Paco-Paco(Kota)Padang* (Yogyakarta: Ombak, 2006)

1906–1990. Buku ini menjelaskan bahwa perubahan penggunaan ruang kota yang sedang terjadi akan terus berkelanjutan, melibatkan ketegangan di antara berbagai kelompok yang memiliki kepentingan. Kota Padang pada mulanya belum diatur, dianggap tidak sesuai dengan standar Eropa. Hal ini disampaikan oleh Nahajis, salah seorang prajurit Belanda. Dalam buku ini dijelaskan bahwa Kota Padang mulai tertata karena kebijakan administrasi militer oleh De Stuers. Oleh karena itu, dibangunlah rumah penjara, bangunan-bangunan petinggi militer serta gudang mesiu.

Kemudian disertasi Eko Alvares Zaidulfar dengan judul Morfologi Kota Padang²⁴. Disertasi ini membahas ekspresi keruangan morfologi Kota Padang yang masih banyak dipengaruhi oleh perkembangan masa lalunya. Kawasan pusat kota masih dipengaruhi oleh konsep kota pertahanan dan sistem kanal yang mulai terbentuk pada pertengahan abad ke-19. Pola sirkulasi dan sistem drainase kota dipengaruhi oleh pembentukan awal kota akibat sistem pengeringan lahan dan pembuatan kanal-kanal pada abad ke-17. Lebih lanjut, pada awal abad ke-18, terjadi perubahan bentuk pertahanan kolonial dari yang semula berupa benteng kecil menjadi benteng besar atau kota pertahanan. Perubahan ini disebabkan oleh perubahan fungsi kota dari hanya pusat perdagangan menjadi pusat pemerintahan dan pertahanan.

Penulisan Kota Padang bisa dilihat pada skripsi yang ditulis Rifki Firdaus

²⁴ Eko Alvares Zaidulfar, “Morfologi Kota Padang”, Disertasi, (Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada, 2002)

dengan judul “ Perkembangan Kota Padang Tahun 1870-1945”²⁵. Penulisan skripsi ini difokuskan pada peninggalan jejak kolonial Belanda. Skripsi ini difokuskan pada bangunan fisik, yakni arkeologi, dan melihat gambaran umum Kota Padang. Sedangkan skripsi ini difokuskan pada Kota Padang sebagai kota militer.

Dalam beberapa artikel, ada beberapa yang membahas mengenai kebijakan militer era Kolonial Belanda diantaranya:

Salah satu artikel yang dimaksud adalah “Kolonialisme dalam Konflik Pembaharuan Islam: Menelusuri Keterlibatan dan Peran Belanda dalam keberlangsungan Konflik yang Terjadi di Minangkabau” yang ditulis oleh Ihsan Sanusi²⁶. Artikel ini membahas Perang Paderi yang diperburuk oleh ambisi Belanda, yang pada mulanya ingin membantu kaum adat, ternyata hanya salah satu strategi untuk bisa meletakkan kekuasaan di Sumatera Barat. Dalam artikel ini, Padang tahun 1821 menjadi tempat awal untuk memulai ekspedisi militer oleh Letnan Kolonel Raaf yang membawa hampir 200 pasukan. Pasukan ini terus meningkat menjadi 500.

Artikel lainnya ditulis oleh Dedi Arsa dengan judul “Tangsi-Tangsi Kolonial Tahanan Perempuan di Sumatera Barat”²⁷. Artikel ini memberikan penjelasan mengenai istilah tangsi di Sumatera Barat yang ternyata memiliki

²⁵ Rifki Firdaus, “Perkembangan Kota Padang 1870-1945”, Skripsi, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2010)

²⁶ Ihsan Sanusi, “Kolonialisme dalam Konflik Pembaharuan Islam: Menelusuri Keterlibatan dan Peran Belanda dalam keberlangsungan Konflik yang Terjadi di Minangkabau”, dalam Majalah Ilmiah Tabuah: Talimat, Budaya, Agama dan Humaniora, Vol. 22.No 1, 1-16, 2018.

²⁷ Dedi Arsa, “Tangsi-Tangsi Kolonial dan Tahanan Perempuan di Sumatera Barat”, dalam jurnal of Gender Studies Kafaah

pengertian berbeda. Tangsi di Sumatera Barat memiliki arti penjara. Kota Padang memiliki penjara pertama di Sumatera Barat pada masa kolonial Belanda. Artikel ini juga memaparkan bahwa cikal-bakal penjara kolonial di Sumatera Barat adalah penjara di Benteng VOC di Padang. Hal ini diperkuat saat terjadinya Perang Paderi di kawasan pedalaman, sehingga tahanan-tahanan dikirim ke Padang.

Berdasarkan studi pustaka yang diajukan di atas, terlihat Kota Padang sudah banyak ditulis oleh para sejarawan. Akan tetapi, penulisan Kota dari sudut sejarah militer belum ada yang melakukan. Oleh karena itu, penulisan ini akan menambah wawasan pembaca dan penting dilakukan untuk menambah penulisan sejarah Kota Padang.

F. Kerangka Analisis

Penelitian ini ditempatkan dalam kajian sejarah kota kolonial dengan pendekatan sejarah militer. Penempatan ini didasarkan pada asumsi bahwa kota-kota kolonial di Indonesia tidak hanya tumbuh sebagai pusat ekonomi dan administrasi, tetapi juga sebagai instrumen kekuasaan yang sangat dipengaruhi oleh kepentingan pertahanan dan keamanan kolonial. Oleh karena itu, pendekatan sejarah militer digunakan untuk menganalisis bagaimana institusi militer kolonial berperan dalam membentuk struktur ruang, fungsi kota, serta kebijakan administrasi Kota Padang pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20.

Dalam perspektif sejarah kota, sebagaimana dikemukakan oleh Sartono Kartodirdjo, kota dipahami sebagai ruang sosial yang berkembang melalui interaksi berbagai fungsi, seperti ekonomi, politik, administrasi, kekuasaan, dan kebudayaan.

Kota bukan sekadar kumpulan bangunan atau entitas fisik, melainkan produk historis yang terbentuk melalui proses panjang interaksi sosial dan relasi kekuasaan. Oleh karena itu, studi sejarah kota berupaya menelusuri perubahan fungsi dan peran kota dari waktu ke waktu, sekaligus mengungkap faktor-faktor yang memengaruhi pembentukan identitas dan karakter suatu kota.

Dalam konteks kolonial, perkembangan kota tidak dapat dilepaskan dari kepentingan pemerintah kolonial sebagai pemegang kekuasaan. Fernand Braudel memandang kota sebagai hasil dari suatu peradaban pada masa tertentu, tempat terjadinya konsentrasi kekuasaan, inovasi, dan aktivitas manusia. Sementara itu, Sirjamäki menekankan kota sebagai pusat aktivitas ekonomi, perdagangan, dan pemerintahan yang didukung oleh keberadaan penduduk tetap serta perangkat administrasi. Dalam praktik kolonial, fungsi-fungsi tersebut sering kali berjalan beriringan dengan kepentingan militer, terutama di wilayah jajahan yang dianggap strategis dan rawan konflik.

Konsep kota kolonial merujuk pada kota-kota yang berkembang di bawah kendali kekuasaan kolonial dan ditata ulang sesuai dengan kepentingan politik, ekonomi, dan militer penjajah. Kota kolonial umumnya dicirikan oleh kehadiran infrastruktur kekuasaan, seperti benteng, barak militer, gudang logistik, penjara, kantor administrasi, permukiman pejabat kolonial, serta kawasan permukiman penduduk berdasarkan stratifikasi sosial dan etnis. Lehmann menyebutkan bahwa benteng dan gudang merupakan elemen penting dalam pembentukan kota kolonial, terutama di wilayah jajahan yang berfungsi sebagai daerah pertahanan dan pengamanan kepentingan kolonial. Simon dan Horvath menegaskan bahwa

hubungan yang asimetris antara penguasa kolonial dan masyarakat pribumi tercermin dalam lanskap kota, baik melalui pola penggunaan ruang, pemisahan kawasan, maupun perbedaan gaya arsitektur.

Dalam kerangka tersebut, kota militer dipahami sebagai kota yang tidak hanya berfungsi sebagai pusat administrasi atau perdagangan, tetapi juga sebagai basis strategis pertahanan dan operasi militer. Kota militer lahir dari kebutuhan penguasa kolonial untuk menjaga stabilitas politik, melindungi kepentingan ekonomi, serta mengendalikan wilayah jajahan yang luas. Secara historis, kota-kota militer berkembang seiring meningkatnya konflik, perlawanan lokal, dan ekspansi wilayah kolonial. Oleh karena itu, kota militer memiliki keterkaitan yang erat dengan kota kolonial, bahkan dalam banyak kasus, kota kolonial tumbuh dan berkembang justru karena fungsinya sebagai basis militer.

Untuk mengidentifikasi Padang sebagai kota militer, penelitian ini menggunakan beberapa indikator analisis yang terintegrasi dengan konsep sejarah kota kolonial. Indikator tersebut meliputi: (1) keberadaan dan persebaran infrastruktur militer, seperti barak, tangsi, gudang senjata, penjara, rumah sakit militer, serta pos-pos penjagaan; (2) peran kota sebagai pusat logistik, mobilisasi, dan perawatan pasukan, terutama dalam konteks konflik kolonial seperti Perang Paderi dan Perang Aceh; serta (3) kebijakan administrasi kolonial yang menempatkan unsur militer sebagai aktor utama dalam pengendalian keamanan, ketertiban, dan tata ruang kota.

Kota Padang pada masa kolonial Belanda menunjukkan karakteristik tersebut secara jelas. Awalnya berkembang sebagai kota pelabuhan dan

perdagangan di Pantai Barat Sumatera, Padang kemudian mengalami perubahan fungsi yang signifikan seiring meningkatnya kepentingan militer Belanda pasca-Perang Paderi dan selama berlangsungnya Perang Aceh. Penempatan pejabat militer, pembangunan barak, gudang senjata, serta penguatan sistem pertahanan kota menunjukkan bahwa fungsi pertahanan menjadi faktor penting dalam pembentukan struktur ruang Kota Padang.

Keberadaan penjara merupakan salah satu unsur penting yang memperkuat karakter Padang sebagai kota militer. Penjara kolonial pertama di Sumatera Barat dibangun di Padang pada awal abad ke-19 dan dikenal dengan istilah *tangsi*. Dalam praktik kolonial, tangsi tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas militer, tetapi juga digunakan sebagai sarana pemidanaan dan pengendalian sosial terhadap masyarakat pribumi. Hal ini menunjukkan keterkaitan yang erat antara fungsi militer dan sistem kekuasaan kolonial dalam pengelolaan kota.

Dengan menggunakan kerangka sejarah kota kolonial dan pendekatan sejarah militer, penelitian ini menganalisis Padang sebagai kota militer melalui tiga aspek utama, yaitu: (1) latar belakang kebijakan kolonial yang mendorong Padang dijadikan basis militer di Pantai Barat Sumatera; (2) bentuk, fungsi, dan persebaran infrastruktur militer dalam struktur ruang Kota Padang; serta (3) dampak keberadaan fungsi militer terhadap perkembangan kota dan perannya sebagai ibu kota Sumatera Westkust. Melalui kerangka analisis ini, diharapkan penelitian dapat menjelaskan secara sistematis posisi Kota Padang sebagai kota militer dalam historiografi kota-kota kolonial di Indonesia, sekaligus memperkaya kajian sejarah kota dan sejarah militer di tingkat regional maupun nasional.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti, penulisan skripsi ini disusun ke dalam lima bab yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Setiap bab disusun secara sistematis guna menjelaskan proses penelitian serta hasil analisis secara berurutan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan berisi latar belakang masalah yang menguraikan konteks dan alasan pemilihan topik penelitian, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka analisis, metode penelitian, serta sistematika penulisan sebagai gambaran umum isi skripsi.

Bab II memberikan gambaran umum tentang Padang. Gambaran umum meliputi gambaran geografis dan kondisi wilayah. Padang menjadi pusat perdagangan VOC serta menjadi pelabuhan penting di kawasan pusat Sumatera Westkust.

Bab III membahas mengenai gambaran Kota Padang sebagai kota militer di Sumatera Barat. Keterlibatan Kota Padang dalam konflik atau ekspedisi militer pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Dalam bab ini juga akan dibahas peran Kota Padang sebagai pusat logistik militer, termasuk penyediaan penjara, persenjataan, perbekalan, dan logistik lainnya.

Bab IV Dampak Penetapan Padang sebagai Kota Militer dan Ibu Kota Sumatra Westkust, membahas pengaruh keberadaan fungsi militer terhadap perkembangan struktur ruang kota, kebijakan administrasi kolonial, serta implikasinya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan tata kota Kota Padang.

Bab V Penutup, berisi kesimpulan yang merangkum hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, serta memuat refleksi dan saran penulis terkait temuan penelitian dan kemungkinan pengembangan kajian selanjutnya.

